



MANAJEMEN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TENGAH

Asep Muslim¹, Rully Chaerul Azwar², Eva Listia Nengsih³ dan Devina⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

asepmuslimsy@gmail.com

Abstrak

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus digerakkan oleh kegiatan ekonomi daerah. Manajemen yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Tujuan dalam penelitian ini antara lain mengetahui manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini terdapat empat fungsi manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah yaitu planning, organizing, actuating dan controlling. Perencanaan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai perencanaan dalam sebuah kinerja pendapatan pertumbuhan ekonomi yang dimana di dalamnya terdapat kebijakan fiskal yang menjadi sebuah pelengkap dalam pendapatan daerah. Pengorganisasian dalam pengelolaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dalam pelaksanaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintahan pusat terkait bahan bakar minyak dengan melakukan koordinasi ke perusahaan Pertamina serta mencari potensi untuk meningkatkan BBM, dan mencari berbagai investor untuk mencapai angka yang lebih baik lagi. Dalam pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dengan manajemen pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Jawa Tengah.

Abstract

Regional original income (PAD) is a source of regional original income which must be driven by regional economic activities. Effective and efficient management of regional own-source revenue (PAD) management is the key to success in optimizing regional revenues. The objectives of this study include knowing the management of local revenue management in the province of Central Java. This research method uses qualitative research using data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The results of this study are that there are four management functions of regional original revenue management, namely planning, organizing, actuating and controlling. Management planning for the management of regional original income has planning in a performance of economic growth income in which there is a fiscal policy which is a complement to regional income. Organizing in the management of local revenue for the province of Central Java is carried out by the Regional Revenue Agency (BAPENDA). In implementing local revenue, Central Java province is working with the central government regarding fuel oil by coordinating with the Pertamina company and looking for potential to increase fuel prices, and looking for various investors to achieve even better numbers. The supervision is carried out by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), the Regional People's Representative Council (DPRD), and the Regional Revenue Agency (BAPENDA). With the management of regional original income, Central Java Province also makes various efforts to increase the potential for regional income.

Keywords: Management, Management, Local Own Revenue, Central Java Province.



PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus digerakkan oleh kegiatan ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) sangat strategis karena merupakan salah satu pilar kemandirian daerah. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber keuangan PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, kinerja pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Sejak berlakunya otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 22 tahun 1999. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang tersebut termasuk kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah atas pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU nomor 34 tahun 2000.

Pengelolaan PAD di provinsi Jawa tengah dimulai dengan pembentukan pemerintah Jawa tengah pada tanggal 15 Agustus 1950. Pada awalnya, pengelolaan pendapatan provinsi ini masih tergantung pada dana pemerintah pusat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya perekonomian di Jawa tengah, penting bagi provinsi ini untuk menggali potensi sumber daya dan pendapatan di wilayah Jawa tengah.

Salah satu langkah provinsi Jawa tengah dalam mengelola pendapatan asli daerah di Jawa tengah dengan pembentukan Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA). BAPENDA memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah, termasuk memaksimalkan penerimaan PAD. BAPENDA bertanggung jawab untuk mengumpulkan berbagai jenis penerimaan,

seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain sebagainya.

Dalam pengelolaan PAD, provinsi Jawa tengah melakukan berbagai Upaya untuk meningkatkan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Provinsi Jawa tengah melakukan inovasi dalam sistem administrasi keuangan dan perpajakan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah proses pengelolaan PAD.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 02-05 Juli 2023, dan lokasi penelitian dilaksanakan di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksud karena instansi tersebut merupakan instansi bertanggung jawab langsung dalam menangani pengelolaan pendapatan asli daerah di provinsi Jawa tengah.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kualitatif. Pengertian kualitatif menurut Sugiyono (2018), Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen, Teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut (Morissan, 2017:143) observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan Panca indra sebagai alat bantu utama dengan kata lain observasi ada-



lah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja Panca indranya.

2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2017:194) wawancara adalah Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.
3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2017:124) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain.

Menurut George R. Terry, dalam bukunya *principles of management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan).

Berikut ini pengertian dari fungsi manajemen menurut George R. Terry:

1. *planning* (perencanaan)
Perencanaan adalah fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. *Organizing* (pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan

macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3. *Actuating* (pelaksanaan)
Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan Ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
4. *Controlling* (pengawasan)
Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apakah perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

BAPENDA bisa diartikan sebagai manajer yang mengatur semua proses dan kegiatan pendapatan asli daerah dan menjalankan fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating* and *controlling* untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah.

Berikut ini tabel realisasi pendapatan daerah provinsi Jawa tengah tahun 2020-2022.



Bisa dilihat dari tabel di atas pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terus mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah, artinya manajemen pengelolaan PAD provinsi Jawa tengah telah berjalan dengan baik.

Edyy Sulistiyo Bramianto, SE,MM. mengatakan bahwa “dari pendapatan daerah, kita ada kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi. pajak PKB itu langsung dari pusat dan yang dioptimalkan itu BKD, BBNKB dan PAP”.

Dengan demikian Pengelolaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah dilakukan oleh BAPENDA sebagai badan utama yang mengelola pendapatan asli daerah Jawa tengah. BAPENDA bisa diartikan sebagai manajer yang mengatur semua proses dan kegiatan pendapatan asli daerah dan menjalankan fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating and controlling untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah.

Pertama, manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai perencanaan dalam sebuah kinerja pendapatan pertumbuhan ekonomi yang dimana di dalamnya terdapat kebijakan fiskal yang menjadi sebuah pelengkap dalam pendapatan daerah. **Kedua**, Pengorganisasian dalam pengelolaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Ketiga, dalam pelaksanaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah bekerja sama dengan pemerintahan pusat terkait bahan bakar minyak dengan melakukan koordinasi ke perusahaan Pertamina serta mencari potensi untuk meningkatkan BBM, dan mencari berbagai investor untuk mencapai angka yang lebih baik lagi. Pemerin-

tah provinsi Jawa Tengah juga bekerja sama dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Bintara Pembina Desa (BABinsa), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) supaya efektif dan efisien untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan juga meningkatkan hasil pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah.

Agar pelaksanaan pendapatan asli daerah lebih efektif dan efisien pemerintah provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai Upaya terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB). Seperti penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), penggunaan sistem bank Jating dalam proses pembayaran di samsat, penggunaan aplikasi New sakpole dan badan usaha digital mandiri atau samsat Budiman.

Selanjutnya yang **keempat**, pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Yang dimana BAPENDA berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah provinsi Jawa Tengah.

SIMPULAN

Manajemen pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah sudah memiliki manajemen yang baik, berdasarkan data realisasi pendapatan daerah provinsi Jawa tengah tahun 2020-2022 selalu mengalami peningkatan dari tahun Ketahun, seperti pada tahun 2020 pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah sebesar Rp. 13.668.282.278.855, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 14.695.474.898.162, serta pada tahun 2022 sebesar Rp. 16.264.700.573.304. Dari data di atas dapat disimpulkan, bahwa manajemen pendapatan asli daerah



provinsi Jawa tengah sudah mencapai peningkatan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- (2023, Juli rabu). Retrieved from pemerintah provinsi jawa tengah: <https://jatengprov.go.id/>
- Andi, Mone, A., & Ma'ruf, A. (2020). Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bima. *Jurnal Administrasi Publikk*, 53-67.
- BAPENDA. (2023). manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah provinsi Jawa tengah. 1-19.
- Firmansyah, D., & Mahardika , B. W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harianto, Sarma, M., & Hakim, M. (2018). strategi peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan Anambas. *manajemen pembangunan daerah*, 15-24.
- Maria, R. (2022, Maret 22). *Great Day*. Retrieved from memahami pengertian dan fungsi ilmu manajemen menurut George R. Terry: <https://greatdayhr.com/id-id/blog/ilmu-manajemen-menurut-gr-terry/>
- Wijayanti, I., & W, K. Z. (2020). peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui efektivitas dan efisien penerimaan pajak daerah dan pajak air tanah. *jurnal manajemen dan bisnis* , 42-56.

